

DAMPAK KRISIS MONETER TERHADAP DAYA SAING AGRIBISNIS AYAM RAS PETELUR DITINJAU DARI SUMBER DAYA DOMESTIK

Saptana & S.K. Dermoredjo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor
(Diterima 22-01-2002; disetujui 16-05-2002)

ABSTRACT

Monetary and economic crisis have led layer chicken to harder problems threatening its sustainability. It is deeply revealed in its profitability level, its competitive and comparative advantage, and impact of the government's policies on the whole inputs-output set two time ranges. According to the data analysis in two sample districts is Bogor and Tasikmalaya some derived results were as the following: firstly, prior to the monetary crisis, layer agribusiness were financially although economically they were still profitable. Following the crisis, layer agribusiness was financially unprofitable, but was economically still profitable. Secondly, prior to monetary crisis, the range of *Private Cost Ratio* (PCR) value for layer agribusiness was between 0.815 and 0.904. Following the crisis, the PCR value for layer agribusiness was 0.851 - 1.173. The third is that prior to the monetary crisis the *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) value for layer agribusiness was 0.767 - 0.897. Following the crisis, the DRCR value for layer agribusiness was 0.715 - 0.817. The fourth is that the government's policies on the whole inputs and outputs for layer agribusiness prior to the monetary crisis showed a protection from the government. However, following the crisis, the protection was reduced even for the layer agribusiness, some of the policies was unprofitable. The development of layer agribusiness in terms of facing free market era, some following strategies could be implemented: (1) government policies in the poultry sectors to focus support the market mechanism working both in input and output market; (2) it takes public investment policy, especially development livestock industry region and social and economics infrastructure; (3) improvement technologies in the livestock sectors, especially research and developing technologies for nutrition use domestic factors, postharvesting and processing, and institutional strengthened.

Keywords: Layer, comparative advantage, competitive advantage, government policies.

PENDAHULUAN

Pada periode 1980-an sampai pertengahan 1990-an subsektor peternakan dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam pembangunan pertanian secara keseluruhan. Selama PJPT I, sumbangan PDB subsektor peternakan terhadap sektor pertanian meningkat dari 6,00 persen menjadi 10,82 persen pada tahun 1997 (Statistik Peternakan, 1998).

Akhir-akhir ini usaha agribisnis ayam ras petelur menghadapi permasalahan yang sangat berat dan mengancam keberlanjutannya sebagai akibat terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi. Beberapa permasalahan utama dalam agribisnis ayam ras petelur adalah: (1) Masalah penyediaan bahan baku pakan, sebagian besar bahan baku pakan ternak penting impor, impor tepung ikan (90-92%); tepung tulang dan vitamin/*feed additive* hampir (100%) impor; hanya dedak yang hampir seluruh kebutuhan berasal dari sumber daya domestik; (2) Adanya indikasi terjadinya ketimpangan struktur pasar baik pada pasar input maupun pasar output yang sekarang sudah dalam bentuk struktur pasar yang oligopolistik; dan (3) Krisis moneter dan ekonomi telah menyebabkan keterpurukan industri ayam ras petelur, karena

terjadinya peningkatan harga saponak khususnya pakan menjadi hampir tiga kali lipat sebelum krisis.

Hasil kajian Tengenjaya, Yusdja & Ilham (2000) jumlah pemakaian bahan baku pakan untuk ayam ras petelur adalah sebagai berikut: jagung (47,14%), dedak (25%), bungkil kedele (13,51%), tepung batu kapur (7,07%), tepung daging (3,37%), tepung bulu (2,00%), tepung tulang (1,06%), minyak sawit (0,34%), garam (0,24%), metionine (0,24%), lysine (0,24%), rapeseed meal (3,00%), dan dicap phosphate (0,94%).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Tingkat profitabilitas agribisnis ayam ras petelur pada kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter.
2. Efisiensi finansial dan ekonomik agribisnis ayam ras petelur berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi, kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter.
3. Dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap output, input (*tradable* dan *domestic factor*), input-output secara keseluruhan.

MATERI DAN METODE

Lokasi Penelitian dan Metode Penarikan Contoh

Penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat dengan mengambil dua kabupaten contoh, yaitu Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya. Dipilih Kabupaten Bogor untuk mewakili daerah sentra produksi yang berdekatan dengan tujuan pasar utama Jakarta,

sedangkan Kabupaten Tasikmalaya untuk mewakili daerah sentra produksi yang jauh dari tujuan pasar utama Jakarta. Metode pengambilan contoh dilakukan dengan cara proporsional acak terstratifikasi (*proportional stratified random sampling*). Secara terperinci sebaran responden contoh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran responden contoh menurut jenis responden dan lokasi penelitian, tahun 1998

Uraian	Kabupaten Bogor	Kabupaten Tasikmalaya
1. Peternak Ayam Ras Petelur		
- Pola KINAK PRA	15	15
- Pola Mandiri	15	15
2. Pedagang sapronak/ <i>poultry shop</i>	3	3
3. Pedagang telur	2	2
Jumlah	35	35

Metode dan Analisis Data

Harga bayangan menggunakan penyesuaian seperti dilakukan Gittinger (1976 dan 1986). Penentuan harga bayangan dengan mengeluarkan distorsi akibat kebijakan pemerintah atau akibat kegagalan pasar. Dalam penelitian ini untuk komoditas yang diperdagangkan akan didekati dengan harga batas (*border price*). Untuk komoditas yang selama ini diekspor digunakan harga *f.o.b* (*free on board*) dan untuk komoditas yang diimpor digunakan harga *c.i.f* (*cost insurance freight*).

Menurut Pearson *et al.* (1976) dalam Haryono (1991), ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya ke dalam komponen domestik dan asing, yaitu pendekatan total dan pendekatan langsung. Pendekatan total diasumsikan bahwa setiap biaya dari *input tradable* produksi domestik dibagi ke dalam komponen biaya domestik dan asing. Hasil alokasi biaya ke dalam komponen domestik dan asing sistem komoditi ayam ras petelur disajikan pada Tabel 2.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan matrik analisis kebijakan (*policy analysis matrix/PAM*).

Dengan menggunakan PAM dapat menjawab tiga tujuan dalam penelitian ini.

Secara terperinci beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam analisis PAM adalah: (1) Perhitungan berdasarkan harga privat, untuk analisis finansial; (2) Perhitungan berdasarkan harga sosial (bayangan), untuk analisis ekonomi; (3) Output bersifat *tradable* dan input dapat dipisahkan ke dalam komponen asing dan komponen domestik; dan (4) Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan dengan demikian dianggap nol.

Pada dasarnya langkah perhitungan PAM terdiri atas empat tahap: (1) penentuan masukan-keluaran fisik secara lengkap dari aktivitas ekonomi yang akan dianalisis; (2) penaksiran harga bayangan (*shadow price*) dari masukan dan keluaran; (3) pemisahan seluruh biaya ke dalam komponen domestik dan asing, serta menghitung besarnya penerimaan, dan (4) menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan oleh PAM. Guna menganalisis daya saing dan dampak kebijaksanaan pemerintah digunakan alat analisis *Policy Analysis Matrix*, seperti pada Tabel 3.

Tabel 2. Alokasi biaya ke dalam komponen domestik dan asing, pada sistem komoditi ayam ras di Jawa Barat

Biaya	Asing (%)	Domesik (%)
A. 1. Anak ayam (DOC)	65,00	35,00
2. Pakan ayam ras	48,79	51,21
3. Obat-obatan, vitamin & mineral	80,00	20,00
4. Listrik	50,00	50,00
5. Pemanas (kerosen)	0,00	100,00
6. Alas kandang (sekam)	0,00	100,00
7. Tenaga kerja	0,00	100,00
8. Karyawan/pegawai	0,00	100,00
9. Penyusutan kandang & alat	50,00	50,00
10. Bunga modal	0,00	100,00
11. Sewa lahan	0,00	100,00
12. Sewa kandang	0,00	100,00
B. 1. Transport/pengangkutan	54,57	45,53
2. Pematangan	50,00	50,00
3. Penanganan	17,19	82,81

Tabel 3. Matrik analisis kebijakan (*policy analysis matrix/PAM*)

	Penerimaan	Input <i>tradable</i>	Input domestik	Keuntungan
Harga privat (finansial)	A	B	C	D ¹
Harga sosial (bayangan)	E	F	G	H ²
Dampak kebijakan	I ³	J ⁴	K ⁵	L ⁶

Sumber: Monke & Pearson, 1989

Keterangan:

1. Keuntungan privat, $D = A - B - C$
2. Keuntungan sosial, $H = E - F - G$
3. Transfer output, $I = A - E$

4. Transfer input, untuk input *tradable*, $J = B - F$
5. Transfer faktor, untuk input non-*tradable*, $K = C - G$
6. Transfer bersih, $L = D - H$ atau $I - J - K$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi dan Daya Saing

Tingkat efisiensi dan kemampuan daya saing ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti keuntungan finansial, keuntungan ekonomik, *profit cost ratio* (PCR) dan *domestic resource cost ratio* (DRCR). Hasil analisis efisiensi dan kemampuan daya saing agribisnis ayam ras petelur berdasarkan pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi penelitian dapat disimak pada Tabel 4.

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras petelur pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi baik secara finansial maupun ekonomik layak diteruskan. Agribisnis ayam ras petelur pada kondisi tersebut juga memiliki keunggulan kompetitif yang ditunjukkan nilai $PCR < 1$ dan mempunyai keunggulan komparatif dengan nilai $DRC < 1$. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras petelur, kecuali pola mandiri di Kabupaten Bogor secara finansial tidak menguntungkan lagi. Kondisi tersebut juga ditunjukkan oleh nilai

PCR yang sebagian besar >1, yang berarti tidak mempunyai keunggulan kompetitif lagi.

Namun, pada kondisi sesudah krisis moneter agribisnis ayam ras petelur pada berbagai pola

pengusahaan, skala usaha dan lokasi menunjukkan bahwa pengusahaan agribisnis ayam ras petelur tetap mempunyai keunggulan komparatif, bahkan keunggulan komparatif yang dimiliki sedikit meningkat.

Tabel 4. Keuntungan finansial dan ekonomik, nilai PCR dan DRCCR sistem komoditi ayam ras petelur per siklus (24 bulan) di Jawa Barat, kondisi sebelum krisis moneter (1996/1997) dan sesudah krisis moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter				Sesudah krisis moneter			
	Keuntungan finansial (Rp/kg telur)	Keuntungan ekonomi (Rp/kg telur)	PCR	DRCCR	Keuntungan finansial (Rp/kg telur)	Keuntungan ekonomi (Rp/kg telur)	PCR	DRCCR
KAB. BOGOR								
1. Pola Kinakpra								
Skala 3 000 ekor	797	669	0.852	0.833	-338	2 295	1.045	0.770
Skala 4 000 ekor	815	667	0.849	0.834	-1 038	1 793	1.144	0.817
Skala 6 000 ekor	758	393	0.842	0.897	-448	2 162	1.060	0.779
2. Pola Mandiri								
Skala 4 000 ekor	589	879	0.882	0.792	120	2 023	0.987	0.798
Skala 6 000 ekor	595	777	0.880	0.811	1 087	2 630	0.888	0.742
Skala 8 000 ekor	811	828	0.835	0.797	760	2 374	0.921	0.765
Skala 14 000 ekor	928	903	0.815	0.781	1 465	2 834	0.851	0.723
Skala 18 000 ekor	807	837	0.829	0.790	1 426	2 899	0.854	0.716
KAB. TASIKMALAYA								
1. Pola Kinakpra								
Skala 1 000 ekor	457	748	0.904	0.823	-82	2 892	1.012	0.724
Skala 2 000 ekor	715	830	0.854	0.797	-277	2 679	1.041	0.740
Skala 3 000 ekor	769	844	0.839	0.788	-681	2 417	1.105	0.761
Skala 4 000 ekor	545	732	0.882	0.815	-636	2 466	1.100	0.754
Skala 5 000 ekor	880	952	0.818	0.767	-1 067	2 136	1.173	0.784
Skala 6 000 ekor	581	761	0.876	0.809	-524	2 443	1.083	0.757
2. Pola Mandiri								
Skala 1 000 ekor	723	835	0.854	0.798	-336	2 776	1.051	0.729
Skala 3 000 ekor	649	782	0.866	0.807	-400	2 731	1.061	0.732
Skala 6 000 ekor	893	956	0.818	0.767	-179	2 936	1.027	0.715

Dampak Divergensi dan Kebijakan di Bidang Output

Campur tangan pemerintah atau adanya divergensi dalam output dapat dilihat dari besarnya nilai transfer output dan NPCO. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut dapat berupa kebijaksanaan perdagangan (tarif atau quota) serta kebijaksanaan subsidi dan pajak. Transfer output merupakan selisih antara penerimaan dalam harga finansial

dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga bayangan. Koefisien proteksi output nominal (NPCO) merupakan indikasi dari transfer output yang ditunjukkan oleh rasio antara penerimaan yang dihitung berdasar harga finansial dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga bayangan. Informasi secara terperinci tentang nilai OT dan NPCO agribisnis ayam ras petelur dapat disimak pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai OT dan NPCO sistem komoditi ayam ras petelur per siklus (24 bulan) di Jawa Barat, kondisi sebelum krisis moneter (1996/1997) dan sesudah krisis moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter		Sesudah krisis moneter	
	OT (Rp/kg telur)	NPCO	OT (Rp/kg telur)	NPCO
KAB. BOGOR				
1. Pola Kinakpra				
Skala 3 000 ekor	2 375	1.360	-2 644	0.839
Skala 4 000 ekor	2 401	1.362	-2 626	0.841
Skala 6 000 ekor	2 381	1.361	-2 628	0.840
2. Pola Mandiri				
Skala 4 000 ekor	1 527	1.229	151	1.009
Skala 6 000 ekor	1 527	1.229	148	1.009
Skala 8 000 ekor	1 527	1.230	151	1.009
Skala 14 000 ekor	1 527	1.230	151	1.009
Skala 18 000 ekor	1 527	1.233	151	1.009
KAB. TASIKMALAYA				
1. Pola Kinakpra				
skala 1 000 ekor	1 400	1.357	-2 545	0.729
skala 2 000 ekor	1 519	1.274	-2 535	0.730
skala 3 000 ekor	1 395	1.227	-2 548	0.729
skala 4 000 ekor	1 391	1.269	-2 556	0.728
skala 5 000 ekor	1 664	1.253	-2 533	0.730
skala 6 000 ekor	1 694	1.261	-2 540	0.729
2. Pola Mandiri				
skala 1 000 ekor	1 484	1.223	-2 571	0.727
skala 3 000 ekor	1 486	1.223	-2 569	0.727
skala 6 000 ekor	1 500	1.224	-2 538	0.729

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras petelur pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai OT dan NPCO yang positif. Nilai transfer output positif mengandung arti bahwa masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Sementara itu, Nilai NPCO > 1 menunjukkan terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang menyebabkan harga finansial lebih besar dari harga bayangannya. Pada kondisi sesudah krisis moneter sebagian besar agribisnis ayam ras petelur diperoleh nilai OT yang negatif dan nilai OT negatif mengandung arti bahwa masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih rendah dari seharusnya. Sedangkan nilai NPCO < 1 menunjukkan terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi

pasar yang menyebabkan harga finansial lebih kecil dari harga bayangannya.

Dampak Divergensi dan Kebijakan di Bidang Input

Dampak divergensi dan kebijakan pemerintah yang terdapat pada *input tradable* ditunjukkan oleh nilai transfer input dan NPCI. Bentuk kebijakan pada *input tradable* dapat berupa kebijakan perdagangan serta subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya dapat disebabkan adanya distorsi pasar. Transfer input menunjukkan selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga finansial dengan biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga bayangan. Koefisien proteksi input nominal (NPCI) sebagai indikasi transfer input, merupakan rasio antara biaya *input*

tradable yang dihitung berdasar harga finansial dengan biaya *input tradable* yang dihitung pada harga bayangan. Sementara itu divergensi atau kebijaksanaan yang terdapat pada input domestik ditunjukkan oleh nilai transfer faktor. Kebijakan yang dilakukan dapat berbentuk subsidi atau pajak,

sedangkan divergensi juga dapat disebabkan distorsi pasar seperti adanya struktur pasar oligopoli, oligopsoni, monopoli dan monopsoni. Secara lebih terperinci informasi mengenai nilai FT, IT dan NPCI dapat disimak pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai IT, NPCI dan FT sistem agribisnis ayam ras petelur per siklus (24 bulan) di Jawa Barat, kondisi sebelum krisis moneter (1996/1997) dan sesudah krisis moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter			Sesudah krisis moneter		
	FT (Rp/kg telur)	IT (Rp/kg telur)	NPCI	FT (Rp/kg telur)	IT (Rp/kg telur)	NPCI
KAB. BOGOR						
1. Pola Kinakpra						
skala 3 000 ekor	1 238	1 009	1.390	188	-198	0.969
skala 4 000 ekor	1 254	999	1.382	262	-56	0.992
skala 6 000 ekor	616	1 400	1.505	287	-305	0.954
2. Pola Mandiri						
skala 4 000 ekor	1 038	780	1.309	1 232	821	1.128
skala 6 000 ekor	1 049	659	1.256	1 096	604	1.097
skala 8 000 ekor	856	688	1.268	1 104	666	1.105
skala 14 000 ekor	854	648	1.258	989	531	1.086
skala 16 000 ekor	778	779	1.301	999	624	1.100
KAB. TASIKMALAYA						
1. Pola Kinakpra						
skala 1 000 ekor	824	867	1.357	-520	-1 051	0.833
skala 2 000 ekor	931	703	1.274	-627	-952	0.853
skala 3 000 ekor	865	605	1.227	-543	-907	0.864
skala 4 000 ekor	856	719	1.269	-566	-889	0.867
skala 5 000 ekor	823	655	1.253	-511	-819	0.881
skala 6 000 ekor	878	697	1.261	-730	-841	0.632
2. Pola Mandiri						
skala 1 000 ekor	919	677	1.271	-521	-937	0.855
skala 3 000 ekor	921	698	1.269	-512	-926	0.858
skala 6 000 ekor	876	686	1.265	-451	-971	0.850

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras petelur pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai FT, IT dan NPCI per satuan yang positif. Nilai FT positif mengandung arti terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang menguntungkan produsen input faktor domestik, yang dapat berupa subsidi pupuk, subsidi tingkat suku bunga atau adanya struktur pasar yang

oligopolistik. Sedangkan nilai IT yang positif mengandung arti terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar pada *input tradable* yang merugikan pelaku agribisnis ayam ras petelur, karena membuat harga *input tradable* yang dibeli produsen menjadi lebih mahal dibanding tidak ada kebijaksanaan atau distorsi pasar.

Sementara itu, nilai NPCI > 1 mengandung arti terdapat proteksi pada produsen *input tradable*, sedangkan sektor yang menggunakan input tersebut yaitu pelaku agribisnis ayam ras petelur (peternak) dirugikan dengan tingginya biaya produksi.

Pada kondisi sesudah krisis moneter agribisnis ayam ras petelur di Kabupaten Bogor diperoleh nilai FT positif, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai FT yang negatif. Sebagian besar agribisnis ayam ras petelur baik di Kabupaten Bogor maupun Tasikmalaya diperoleh nilai IT yang negatif

dan nilai NPCI < 1, kecuali pola mandiri di Kabupaten Bogor yang mempunyai makna sebaliknya.

Dampak Divergensi dan Kebijakan Input-Output

Dampak divergensi dan kebijakan input dan output secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai NT, EPC, EPR dan SRP. Dampak divergensi dan kebijakan pemerintah terhadap input dan output pada perusahaan agribisnis ayam ras petelur dapat disimak pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai NT, PC, EPC dan SRP sistem komoditi ayam ras petelur per siklus di Jawa Barat, kondisi sebelum krisis moneter (1996/1997) dan sesudah krisis moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter				Sesudah krisis moneter			
	NT (Rp/kg telur)	PC	EPC	SRP	NT (Rp/kg telur)	PC	EPC	SRP
KAB. BOGOR								
1. Pola Kinakpra								
skala 3 000 ekor	128	1.191	1.341	0.019	-2 633	-0.147	0.755	-0.160
skala 4 000 ekor	147	1.221	1.349	0.022	-2 831	-0.579	0.738	-0.171
skala 6 000 ekor	365	1.927	1.257	0.055	-2 610	-0.267	0.762	-0.159
2. Pola Mandiri								
Skala 4 000 ekor	-290	0.670	1.177	-0.043	-1 902	0.060	0.993	-0.116
Skala 6 000 ekor	-187	0.766	1.212	-0.027	-1 544	0.413	0.956	-0.094
Skala 8 000 ekor	-17	0.979	1.205	-0.003	-1 619	0.319	0.949	-0.098
Skala 14 000 ekor	25	1.028	1.213	0.004	-1 369	0.517	0.963	-0.083
Skala 16 000 ekor	-30	0.964	1.188	-0.005	-1 472	0.492	0.954	-0.089
KAB. TASIKMALAYA								
1. Pola Kinakpra								
Skala 1 000 ekor	-291	0.611	1.126	-0.044	-2 974	-0.028	0.667	-0.177
Skala 2 000 ekor	-116	0.861	1.200	-0.017	-2 956	-0.103	0.653	-0.176
Skala 3 000 ekor	-76	0.910	1.198	-0.011	-3 097	-0.282	0.640	-0.185
Skala 4 000 ekor	-187	0.745	1.170	-0.028	-3 102	-0.258	0.635	-0.185
Skala 5 000 ekor	-73	0.924	1.184	-0.011	-3 204	-0.500	0.624	-0.191
Skala 6 000 ekor	-180	0.764	1.176	-0.027	-2 968	-0.214	0.632	-0.177
2. Pola Mandiri								
Skala 1 000 ekor	-112	0.865	1.195	-0.017	-3 113	-0.121	0.646	-0.186
Skala 3 000 ekor	-133	0.830	1.194	-0.020	-3 131	-0.146	0.643	-0.187
Skala 6 000 ekor	-63	0.934	1.198	-0.009	-3 115	-0.061	0.654	-0.186

Pada kondisi sebelum krisis moneter sebagian besar agribisnis ayam ras petelur baik di Kabupaten Bogor maupun Tasikmalaya diperoleh nilai NT negatif, PC < 1, EPC > 1, dan nilai SRP negatif. Nilai NT

negatif menunjukkan tidak adanya insentif ekonomi bagi pelaku agribisnis ayam ras petelur di kedua daerah yang diteliti. Nilai PC < 1, menunjukkan keuntungan yang diterima pelaku agribisnis ayam ras

petelur lebih kecil dibanding bila tidak ada campur tangan pemerintah atau distorsi pasar. Sementara itu, nilai $EPC > 1$ mengandung arti bahwa terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang bersifat melindungi pelaku agribisnis ayam ras petelur. Proteksi tersebut dapat berupa subsidi, fasilitas ekspor atau adanya distorsi pasar yang menyebabkan harga finansial output lebih besar dari harga bayangannya dan atau harga finansial input lebih kecil dari harga bayangannya.

Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter hampir pada semua pola pengusahaan diperoleh nilai NT negatif, $PC < 1$ dan negatif, dan $EPC < 1$. Nilai NT negatif menunjukkan bahwa setelah terjadi krisis moneter tidak ada insentif ekonomi bagi pelaku agribisnis ayam ras petelur untuk meningkatkan produksi telur. Sedangkan nilai $PC < 1$ dan negatif mengandung arti bahwa usaha agribisnis ayam ras petelur mengalami kerugian. Sementara itu, nilai $EPC < 1$ menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang ada tidak lagi melindungi pelaku agribisnis ayam ras petelur.

Pada kondisi sebelum terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras petelur pola KINAKPRA di Kabupaten Bogor diperoleh nilai SRP positif, sedangkan pada pola Mandiri di Kabupaten yang sama diperoleh nilai SRP negatif kecuali untuk skala 14000 ekor. Sementara itu untuk dua pola yang sama di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai SRP yang negatif. Nilai SRP positif mengandung arti bahwa kebijaksanaan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan pelaku agribisnis ayam ras petelur mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan untuk berproduksi dan atau sebaliknya. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter pada berbagai pola usaha, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai SRP yang negatif. Artinya, pada kondisi setelah terjadi krisis moneter terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang menyebabkan pelaku agribisnis ayam ras petelur mengeluarkan biaya produksi lebih besar dan biaya imbalan berproduksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem komoditi ayam ras petelur pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum krisis moneter adalah menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomik. Pada kondisi setelah terjadi krisis

moneter maka sistem komoditi ayam ras petelur pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti sebagian besar mengalami kerugian secara finansial, namun secara ekonomik tetap menguntungkan.

2. *Rasio biaya privat (PCR)* sistem komoditi ayam ras petelur pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum krisis moneter menunjukkan bahwa pengusahaan komoditi ayam ras memiliki keunggulan kompetitif. Namun, pada kondisi setelah terjadi krisis moneter menunjukkan bahwa pengusahaan komoditi ayam ras petelur kurang atau tidak memiliki keunggulan kompetitif lagi.
3. *Rasio biaya sumber daya domestik (DRCR)* sistem komoditi ayam ras petelur pada berbagai pola, skala usaha, dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum dan sesudah terjadi krisis moneter menunjukkan bahwa pengusahaan komoditi ayam ras petelur memiliki keunggulan komparatif.
4. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan pada kondisi sebelum krisis moneter menunjukkan adanya perlindungan (proteksi) dari pemerintah pada sistem komoditi ayam ras petelur. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter pengusaha agribisnis ayam ras petelur tidak memperoleh proteksi dari pemerintah, bahkan secara keseluruhan kebijaksanaan pemerintah yang diterapkan bersifat merugikan pengusaha agribisnis ayam ras petelur.

Saran

1. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perunggasan diarahkan untuk menjamin berlakunya mekanisme pasar yang bermuara pada penggunaan sumber daya domestik secara efisien, baik pada pasar input maupun pasar output yang kompetitif.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem komoditi ayam ras petelur maka perlu adanya kebijakan investasi publik (*public investment policy*), kebijakan tersebut dapat berupa pengembangan sentra produksi peternakan dalam bentuk Kawasan Industri Peternakan (KINAK) ayam ras petelur di daerah pedesaan yang merupakan daerah sentra produksi bahan baku pakan dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
3. Untuk terus memacu peningkatan teknologi di bidang perunggasan maka kebijakan penelitian perunggasan diarahkan untuk memantapkan struktur industri perunggasan nasional yang

berbasis pada ketersediaan bahan baku dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 1997. *Statistik Industri Besar dan Sedang*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 1998. *Buku Statistik Peternakan*. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.
- Gittinger, J.P. 1976. *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*. Edisi pertama. Terjemahan Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Gittinger, J.P. 1986. *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*. Edisi 1986. Terjemahan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Haryono, D. 1991. Keunggulan Komparatif dan dampak Kebijakan pada Produksi Kedelai, Jagung dan Ubikayu di Propinsi Lampung. *Thesis Pasca Sarjana*. IPB Bogor.
- Monkey, E.A. & S.R. Pearson. 1995. *The Policy Analysis Matrix for A Agricultural Development*. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Tangenjaya, B., Y. Yusmichad & Nyak Ilham. 2000. *Analisis Permintaan Jagung Industri Pakan Ternak*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.